

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Telaah Peningkatan
Kualitas PAI di Kabupaten Pamekasan**

Atnawi

Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

Email: tiensatnawi@yahoo.com

Abstrak

Kebijakan peningkatan kapabilitas personal pengelolaan lembaga pendidikan serta mengimplementasikan gerakan pembangunan masyarakat Islam atau (Gerbang Salam) yang menjadi jargon masyarakat Pamekasan, sedangkan dalam hal kuantitas jam mata pelajaran, kebijakan pemerintah dalam hal ini di sekolah umum, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat perguruan tinggi. Kebijakan untuk memberikan muatan mata pelajaran agama yang porposional dan professional juga dilakukan, serta kebijakan untuk memberlakukan aturan bahwa semua siswa yang mau masuk SMP harus bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, selain itu, PAI agar lebih dimaksimalkan kembali materi pelajaran yang sudah tertera dalam kurikulum. Efeknya adalah penciptaan suasana maysarakat madani sebagaimana yang cita-citakan akan mendekati kepada sebuah keberhasilan, Efek dari kebijakan pemerintah yang lain dalam meningkatkan kualitas PAI adalah meningkatnya kapabilitas personal (tenagan pendidik dan tenaga kependidikan) dilingkungan Pamekasan, kemudian berdampak pada berkurangnya jumlah kenakalan remaja.

Kata kunci: Kebijakan, Peningkatan kualitas, PAI

Abstract

The policy of enhancing the management capabilities of educational institutions and implementing the Islamic community development movement (Gerbang Salam) is the jargon of the Pamekasan community, while in terms of the quantity of subject hours, government policies in this case in public schools, ranging from basic education to college level education high. The policy to provide porional and professional religious subjects is also carried out, as well as the policy to enforce the rules that all students who want to enter junior high school must be able to read the Koran well and correctly, in addition, PAI is to maximize the subject matter already stated in the curriculum. The effect is the creation of a civil society atmosphere that aspires to be close to a success. The effect of other government policies in improving the quality of PAI is the increase in personal capabilities (tenagan educators and educational staff) in Pamekasan, then the reduction in the number of juvenile delinquency.

Keywords: Policy, Quality improvement, PAI

Pendahuluan

Kemajuan pembangunan di berbagai sektor, membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang kemudian pembangunan dan pengembangan managemennya perlu juga dikembangkan.¹ Termasuk juga dalam tatanan dunia pendidikan umum maupun pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah upaya untuk melakukan sebuah proses peningkatan pendidikan, khususnya pendidikan Islam kearah yang lebih serius dan lebih baik, fenomena ini kemudian diikuti oleh perubahan sikap masyarakat yang semakin hari yang semakin selektif dalam memilih dan memilah lembaga-lembaga pendidikan bagi putra dan putri mereka yang ideal dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini.²

Maka dari itu, pemerintah yang dalam hal ini mempunyai peran yang strategis dan mempunyai andil yang cukup besar terhadap kemajuan dan kemunduran suatu Negara yang mereka kelola melalui dunia pendidikan tersebut. Dengan demikian, maka suatu kebijakan pendidikan yang pemerintah keluarkan pada hakekatnya bukan hanya berdampak

kepada maju atau mundurnya dunia pendidikan, melainkan juga berimplikasi pada maju atau mundurnya peradaban di suatu Negara itu sendiri.

Pemerintah mempunyai sebuah peraturan yang berfungsi sebagai kontrol yang kemudian mempunyai fungsi-fungsi seperti:

1. Sebagai pemersatu bangsa,
2. Perluasan kesempatan, dan
3. Sebagai pengembangan diri.

Dengan demikian pendidikan Islam diharapkan akan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk ikut serta dalam rangka melaksanakan tugas pembangunan, dan memungkinkan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki masing-masing. Sehingga dibutuhkan suatu upaya dan usaha untuk meningkatkan kompetensi mereka melalui peningkatan kualitas pendidikan.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan Nasional yang ada di Negara Indonesia. Misi pendidikan Nasional adalah untuk mengupayakan perluasan

¹A. Halim, Rr. Suhartini, M. Chairul Arif, A. Sunarto AS, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: CV Pustaka pesantren, 2005), 39.

²Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah*, (Jakarta: 2004), iii.

³H.A.A.R Tilaar, *Beberapa agenda system pendidikan Nasional dalam perspektif abad ke-21*, (Jakarta: Tera Indonesia, 1998), 60.

kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat Nasional, Regional, maupun pada tingkat Internasional.⁴

Jika ditinjau dari sisi sejarah, maka dapat disimpulkan bahwa jika sistem pemerintahan berganti, maka berganti pula format dan tampilan pendidikan di Negeri ini. Sebagai salah satu contohnya adalah pada masa pemerintahan Soekarno, skenario yang pertama kali dilakukan oleh presiden pertama yaitu Soekarno dan kabinetnya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga ideology dan pelajaran yang ditekankan adalah masalah ideology kebangsaan, semangat patriotisme dan lain sebagainya. Kemudian ketika kekuasaan berpindah tangan kepada masa pemerintahan Suharto, maka semangat pembangunan serta gotong royong merupakan titik tekan yang harus ditekankan pada pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan sekarang model dan gaya pemerintah terhadap dunia pendidikan adalah penanaman sikap dan karakter merupakan upaya agar Negeri ini menjadi Negeri yang berbudaya karakter walaupun di berbagai transisi pemerintahan

mempunyai istilah yang juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.⁵

Pendidikan Islam merupakan salah satu cabang dari dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini, system pengelolaan pendidikannya menganut pada system dua pintu, yaitu pintu Kementerian pendidikan dan kebudayaan dan pintu yang kedua adalah Kementerian Agama yang didalamnya bukan hanya mengurus persoalan ke-Agamaan semata, melainkan juga masalah dunia pendidikan Agama Islam, maka dari itu, pendidikan Agama Islam ini merupakan salah satu program yang secara struktural ada pada naungan Kementerian Agama, walaupun pada hakekatnya didalam dunia pendidikan umum yang notabennya ada dibawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan juga ada pendidikan Agama dengan cara melakukan kerjasama antara dua kementerian tersebut, baik dalam bidang ketenagaan maupun materi pelajaran yang disampaikan kepada para anak.⁶

Pemerintah yang dalam hal ini adalah pemangku dan pengambil sebuah kebijakan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah mereka memiliki hak otoritas

⁴Mukhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada Press,2010), 413.

⁵ <http://aliflukmanulhakim.blogspot.com>.

⁶Haryatmoko, *Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis-Menemukan Kembali Kebangsaan*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008), 67.

kebijakan dalam mengembangkan dan memajukan dunia pendidikan yang ada di wilayah mereka masing-masing. Hal ini termasuk pemerintah daerah di Kabupaten Pamekasan yang berada di wilayah provinsi Jawa timur.

Wilayah Pemerintahan Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di wilayah kepulauan Madura yang berada pada wilayah Provinsi Jawa Timur yang tergolong kepada wilayah atau kabupaten yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam, sehingga pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Agama merupakan hal yang mutlak perlu untuk dilakukan dengan serius, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Pamekasan yang religius.

Oleh karena itu, banyak sekali upaya dan usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan Agama Islam. Kalau lembaga pendidikan Islam yang ada dibawah Kementerian Agama yang dalam hal ini adalah lembaga pendidikan yang bernama Madrasah dan pondok pesantren tentunya sudah begitu jelas sudah ditangani oleh Kementerian Agama yang memang sudah bidangnya dalam mengelola dan mengembangkan serta

meningkatkan kualitas pendidikan Islam, dan pemerintah kabupaten tinggal memberikan dukungan ataupun *supporting* kepada mereka khususnya terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan kementerian Agama, namun bagaimana dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada dibawah naungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang secara hirarkis berada langsung dibawah komando pemerintah kabupaten.

Persoalan peran pemerintah dalam memberikan kebijakan pendidikan dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan Agama Islam ini bukan suatu persoalan yang mudah, karena hal ini menyangkut kapabilitas dan bidang keahlian yang dimiliki oleh tenaga-tenaga yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten yang notabennya keahlian mereka rata-rata dalam ke-ilmuan umum. Selain itu, persoalan kebijakan ini biasanya berdampingan dengan kepentingan politik, sehingga kepentingan politik inilah yang kemudian menimbulkan efek positif dan negatif bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Agama Islam tersebut.

Sehingga menurut hemat peneliti, persoalan ini menjadi cukup menarik perhatian peneliti, khususnya terkait dengan upaya-upaya serta kebijakan

pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan Agama Islam yang ada di wilayah kabupaten Pamekasan tersebut.

Metode penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologis, adapun jenis penelitiannya dapat dikategorikan sebagai *develepmental researech*.⁷

2. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga tehnik yaitu interview, observasi, dokumentasi.

3. Analisis data

Tahap analisis data, terdiri dari beberapa pekerjaan yakni: induksi, tipologi, konseptualisasi maupun interpretasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian maupun setelah selesai penelitian.

4. Pengecekan keabsahan data

Untuk mengecek keabsahan atau validitas temuan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti yaitu dengan: a)

melakukan perpanjangan kehadiran peneliti, b) Observasi yang diperdalam, c) Triangulasi.

5. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dan non manusia yang diambil secara *purposive sample*, dalam rangka menemukan informasi semaksimal mungkin tentang sasaran atau sumber data yang diinginkan, khususnya yang terkait dengan penelitian ini.

Pembahasan

Upaya peningkatan kualitas pendidikan Agama Islam melalui kebijakan pemerintah merupakan salah satu langkah kongkrit yang dapat dilakukan untuk mencetak dan membentuk generasi bangsa yang berkualitas dalam berbagai bidang, baik dalam hal agama maupun ilmu yang lainnya yang mempunyai nilai-nilai religious, seperti sikap sopan santun, ber etika dan bertaqwa kepada Allah swt.

Kajian teoritis terkait dengan upaya pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam perlu untuk dilakukan mengingat teoritik ini merupakan pijakan peneliti untuk melakukan sebuah kajian analisis terkait dengan tema yang peneliti lakukan.

Oleh karena itu peneliti memulainya dari pengertian pendidikan, kemudian

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).hlm.6.

dasar dan tujuan pendidikan, peningkatan pendidikan serta peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Pendidikan Agama pada dasarnya untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode, seperti peningkatan kualitas diberbagai bidang, mulai dari materi pelajaran, metode hingga persoalan SDM (sumber daya manusia) yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pendidikan.

Pendidikan, dari segi kehidupan kultur umat manusia tidak lain adalah sebagai salah satu alat pembudayaan masyarakat manusia itu sendiri. Pendidikan juga berfungsi sebagai suatu

alat pendidikan agar dapat difungsikan untuk mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan hidup manusia. Sebagai makhluk pribadi, dan juga makhluk social kepada titik yang optimal kemampuan untuk memperoleh kesejahteraan hidup dunia maupun di akhirat. Untuk itulah maka pendidikan harus benar-benar memiliki kualitas bagi umat manusia.

Peningkatan kapabilitas personal pengelolaan lembaga pendidikan dalam bidang pendidikan dan pengembangannya, serta implementai gerakan pembangunan masyarakat Islam (Gerbang Salam) yang menjadi jargon masyarakat kabupaten pamekasan, sehingga dengan demikian, program peningkatan kualitas pendidikan agama islam melalui program gerbang salam ini akan menjadi bermak dan berhasil dengan baik jika semua elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat ini berkejasama, bahu membahu, bantu membantu dalam mewujudkan masyarakat yang religius dan berkualitas, baik dari sisi keilmuan, maupun dalam bidang yang lainnya.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan agama islam ini juga dapat dilakukan dengan melakukan penambahan jam mata pelajaran agama di sekolah-sekolah umum, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat perguruan tinggi.

Dari sisi kuantitas, pendidikan agama memang menempati posisi yang kurang strategis, karena pendidikan agama hanya mempunyai beberapa jam saja dalam satu minggu, sedangkan mata pelajaran umum lebih dari itu, oleh karena itu, wajar jika pendidikan agamadi seklah-sekolah umum kurang begitu berhasil, sehingga banyak sekali orang yang cerdas dalam bidang imu umum, akan tetapi kering dalam bidang agama, sehingga ketika sudah menjadi orang besar, maka yang terjadi adalah menjadi orang yang kurang baik dari sisi moral dan kualitas keagamaannya yang juga rendah, dan bukan ini sebenarnya yang diinginkan.

Hal yang lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya dan usaha meningkatkan kualitas pendidikan agama islam adalah dengan melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan dengan cara memberikan himbawan kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan agar memberikan muatan mata pelajaran agama yang porposional dan professional.

Artinya pendidikan agama bukan hanya dijadikan bahan pelengkap dan muatan local semata-mata memenuhi beban kurikulum yang digariskan leh pemerintah, melainkan juga mata pelajaran agama dapat dijadikan bahan penyeimbang bagi asupan kecerdasan anak dari sisi

spiritual religios anak. Jadi bukan hanya memperhatikan sisi kecerdasan emosional, kecerdasan kognitif semata, melainkan juga kecerdasan spiritual juga perlu diperhatikan para praktisi pendidikan.

Langkah kongkrit yang lain juga data dilakukan oleh pemerintah seperti memberikan aturan dan kebijakan bahwa semua siswa yang mau masuk sekolah menengah pertama (SMP) mereka harus bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, tentunya langkah ini menjadi salah satu solusi alternative yang cukup jitu untuk pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, karena dengan demikian, para siswa akan memiliki bekal dasar dalam belajar agama sehingga ini akan meringankan proses belajar agama disekolah.

Hal yang lain adalah dengan melakukan pengkajian kurikulum PAI agar lebih dimaksimalkan kembali materi pelajaran yang sudah tertera dalam kurikulum. Artinya pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan Islam dapat dilakukan oleh para pengelola dan pelaksana program pendidikan dengan berbagai macam dan cara yang di antaranya adalah dengan mengadakan pengembangan kurikulum pendidikan yang diterapkan dalam satuan pendidikan.

Pelaksanaan pengembangan kurikulum adalah suatu proses untuk

meningkatkan dan mengembangkan dari kurikulum yang sudah ada di lembaga tersebut. Pengembangan ini juga mengarahkan kurikulum tersebut pada tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dalam, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik.

Oleh karena itu pengembangan kurikulum merupakan salah satu faktor bagi upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh para pengelola lembaga pendidikan termasuk didalamnya adalah peran guru dalam melaksanakan tugas pengajaran, sehingga dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan dengan pengembangan kurikulum tersebut hendaknya bersifat antisipatif, adaptif dan aplikatif sehingga akhirnya orientasi pengembangan kurikulum menurut Seller menyangkut enam aspek, yang di antaranya adalah:

- 1) Tujuan pendidikan menyangkut arah kegiatan pendidikan, artinya, hendak dibawa ke mana siswa yang kita didik itu.
- 2) Pandangan tentang anak, apakah anak dianggap sebagai organisme yang aktif atau pasif.
- 3) Pandangan tentang proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran itu dianggap sebagai

proses transformasi ilmu pengetahuan atau mengubah perilaku anak.

- 4) Pandangan tentang lingkungan, apakah lingkungan belajar harus dikelola secara formal, atau secara bebas yang dapat memungkinkan anak bebas belajar.
- 5) Konsepsi tentang peranan guru, apakah guru harus berperan sebagai instruktur yang bersifat otoriter, atau guru dianggap sebagai fasilitator yang siap memberi bimbingan dan bantuan pada anak didik untuk belajar.
- 6) Evaluasi belajar: apakah mengukur keberhasilan ditentukan dengan tes atau nontes.⁸

Dengan demikian upaya untuk menciptakan suasana yang religius melalui kegiatan perayaan keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah, seperti pengajian-pengajian yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dan lain sebagainya.

Adapun dari sisi kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di antaranya adalah adanya kenakalan para remaja yang berlebihan, kemudian banyaknya kasus kehamilan diluar nikah dikalangan para remaja, serta kurang sadarnya mereka para anak muda dan masyarakat umum sekalipun akan adanya syariat Islam, ditambah lagi masalah merosotnya moral dan akhlak dikalangan para pemuda, serta keteladanan yang kurang dimaksimalkan oleh guru, para orang tua dan lingkungan

⁸Afid Karim, *Pengembangan Kurikulum*,(Artikel Kurikulum, 2012).

sekitar yang memberikan keteladanan yang kurang baik, dan kurangnya ketertarikan para siswa pada maple PAI, merupakan setumpuk persoalan yang kemudian menjadi penghambat bagi pelaksanaan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam.

Memaksimalkan PAI di sekolah, dalam hal ini pemerintah harus menyadari bahwasannya anak-anak generasi muda merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Merekalah yang kelak akan mengisi ruang-ruang proses berbangsa dan ber Negara. Wajar saja ketika banyak orang yang menyerukan bahwa anak adalah bibit-bibit atau tunas yang harus diperhatikan dan dirawat dengan baik.

Mereka adalah pewaris masa depan, tulang punggung dan harapan bangsa dan Negara ada di pundak mereka. Namun, harapan itu ternyata masih membentur oleh tembok yang sangat besar salah satu di antaranya adalah masih banyaknya di temukan anak-anak kurang mampu yang mereka harus berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya.

Sering dijumpai bahwa anak-anak Indonesia harus dipaksa mengemis demi menghidupi keluarga, melakukan tindak kriminal dan terlantar karena ketimpangan ekonomi. Tidak jarang pula anak-anak seringkali menghadapi bentuk-bentuk kekerasan baik fisik maupun non fisik.

Padahal, anak-anak Indonesia harusnya berada di rumah, belajar dengan baik dan menikmati tugas-tugas bagi tumbuh kembang diri mereka. Disinilah peran pemerintah harus ditingkatkan dalam rangka peningkatan pendidikan anak-anak Indonesia.

Mensosialisasikan syari'at islam kepada segenap lapisan masyarakat, kemudian menanamkan nilai-nilai aklakul karimah sedini mungkin, serta memberikan contoh teladan yang baik, mulai dari guru orang tua dan lingkungan masyarakat, dalam dunia pendidikan guru PAI harus kreatif agar siswa senang belajar PAI dan lain sebagainya.

Karena kemajuan suatu negara sangat ditentukan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Semakin berkualitas SDM maka semakin maju dan sejahtera negara tersebut, sebagai contoh Jepang, Singapura dan Malaysia, dan lainnya. Sedangkan, kualitas SDM ditentukan dengan kualitas pendidikan. Dengan demikian pendidikan yang berkualitas menjadi faktor penting bagi kemajuan suatu Negara. Semakin berkualitas pendidikan maka semakin maju Negara dan sebaliknya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia harus

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, pemerintah diwajibkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional bagi seluruh warga Negara Indonesia. Sistem pendidikan Nasional dimaksud harus mampu untuk menjamin pemerataan dan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak, generasi penerus keberlangsungan dan kejayaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara teori, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual ke-Agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Selain itu, pendidikan adalah alat untuk merubah cara berpikir kita dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir ilmiah (modern). Pendidikan mempunyai tugas

menyiapakan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seiring dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Namun hingga kini, upaya pemerintah untuk menangani permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan dasar dirasakan masih belum tuntas. Hal tersebut dibuktikan dengan setiap bergantinya rezim pemerintahan, utamanya dengan bergantinya menteri pendidikan, diikuti dengan bergantinya kurikulum pendidikan.

Dari sini tampak bahwa pemerintah masih belum menemukan bentuk pengelolaan pendidikan yang tepat bagi anak-anak kategori usia pendidikan dasar dan masih mencari-cari bentuk yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penutup

1. Kebijakan pemerintah pamekasan dalam meningkatkan kualitas PAI

Kebijakan pemerintah kabupaten Pamekasan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas diberbagai bidang, mulai dari materi pelajaran, metode hingga persoalan SDM (sumber daya manusia)

yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pendidikan.

Selain itu, kebijakan peningkatan kapabilitas personal pengelolaan lembaga pendidikan dalam bidang pendidikan dan pengembangannya. Serta kebijakan dalam mengimplementasikan gerakan pembangunan masyarakat Islam atau (Gerbang Salam) yang menjadi jargon masyarakat kabupaten Pamekasan, sedangkan dalam hal kuantitas jam mata pelajaran, kebijakan pemerintah dalam hal ini di sekolah-sekolah umum, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat perguruan tinggi.

Kebijakan untuk memberikan muatan mata pelajaran agama yang proporsional dan profesional juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten pamekasan, serta kebijakan untuk memberlakukan aturan bahwa semua siswa yang mau masuk sekolah menengah pertama (SMP) mereka harus bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, ditambah lagi masalah kebijakan untuk melakukan pengkajian kurikulum PAI agar lebih dimaksimalkan kembali materi pelajaran yang sudah tertera dalam kurikulum, karena materi PAI merupakan materi penunjang bagi implementasi pendidikan berkarakter, dan yang terakhir adalah kebijakan untuk menciptakan

suasana yang religius melalui kegiatan perayaan keagamaan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah, seperti pengajian-pengajian yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dan lain sebagainya.

2. Efek kebijakan pemerintah pamekasan dalam meningkatkan kualitas PAI

kualitas pendidikan Agama Islam, maka efeknya adalah penciptaan suasana masyarakat madani sebagaimana yang cita-citakan akan mendekati kepada sebuah keberhasilan, Efek dari kebijakan pemerintah yang lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam adalah meningkatnya kapabilitas personal (tenagan pendidik dan tenaga kependidikan) dilingkungan kabupaten Pamekasan, sehingga dengan demikian diharapkan dengan meningkatnya kualitas personal, maka akan meningkat pula kualitas hasil pendidikan yang dilakukannya.

Efek dari kebijakan pemerintah yang selanjutnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam adalah berhasilnya gerakan pembangunan masyarakat yang Islami (gerbang salam) sebagaimana yang diatur dalam peraturan bupati no 40 tahun 2009 tentang gerbang salam,

Sedangkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam adalah meningkatnya kualitas keagamaan para peserta didik sehingga dengan demikian akan berdampak kepada berkurangnya angka jumlah kenakalan remaja yang dinilai semakin hari semakin bertambah, karena dengan menguatnya nilai-nilai agama yang ada pada diri para remaja, maka akan sedikit mengurangi angka kenakalan remaja tersebut, yang pada akhirnya akan terciptanya suasana yang religius dalam kehidupan masyarakat kabupaten Pamekasan dalam keseharian mereka, sehingga yang tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah terciptanya suasana aman, damai dan eratnya komunikasi antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim, Rr. Suhartini, M. Chairul Arif, A. Sunarto AS, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: CV Pustaka pesantren, 2005).
- Afid Karim, *Pengembangan Kurikulum*, (Artikel Kurikulum, 2012).
- Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah*, (Jakarta: 2004).
- H.A.A.R Tilaar, *Beberapa agenda system pendidikan Nasional dalam perspektif abad ke-21*, (Jakarta: Tera Indonesia, 1998).

Haryatmoko, *Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis-Menemukan Kembali Kebangsaan*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008).

Mukhtar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

<http://aliflukmanulhakim.blogspot.com>.